
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM MEMBINA KERUKUNAN BERAGAMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

IMPLEMENTATION OF GENERAL PUBLIC AFFAIRS IN NURTURING RELIGIOUS HARMONY BY THE GOVERNMENT OF BANDUNG CITY

NOVIE INDRAWATI SAGITA

Novie Indrawati Sagita

Departemen Ilmu
Pemerintahan, FISIP
Universitas Padjadjaran
Jln. Raya Bandung –
Sumedang Km. 21 Jatinangor,
Kab. Sumedang
Email: Novie.indrawati.
sagita@unpad.ac.id
Naskah Diterima:
Tanggal 7 September 2017.
Revisi 28 Desember 2017-28
Mei 2018.
Disetujui 1 Juni 2018.

Abstract

The issue of intolerance and radicalism has become contemporary social issues, including in Bandung City. Various cases of intimidation and denial of building religious houses, as well as the cases of terrorism in public places, have added to the list of intolerance and radicalism issue in the city of Bandung. In order to prevent a wider conflict, Bandung City Government implemented a national action program through the establishment of a village of tolerance and religious harmony coaching activities, which became part of the task of local government in carrying out general government affairs as stipulated in national law. This study discusses the implementation of general government affairs in fostering religious harmony in the city of Bandung. This research aims at understanding the processes, constraints, and strategies undertaken in carrying out the general government affairs. This research employs qualitative approach. The results show that the Government of Bandung City is adequately effective in dealing with the social conflict and religious intolerance. Bandung City Government has conducted a series of program and activities to develop and maintain social and religious harmony in ethical and cultural diversity setting. Coordination among local leaders in 'Forkopimda' both at city level and sub-district level is synergistically established in anticipation and prevention of existing social conflict symptoms. Although the implementation of religious harmony counseling has been running effectively, but the Bandung City Government needs to build a model of coaching which increases the involvement of both public and private parties so as to further nurture greater religious harmony as well as social harmony in suppressing the potential of socio-political conflict and fragmentation within the society.

Keywords: Intolerance, Radicalism, General Government Affairs, Religious Harmony.

Abstrak

Isu intoleransi dan radikalisme menjadi masalah sosial kontemporer dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung. Berbagai kasus intimidasi dan penolakan rumah ibadah agama lain, serta kasus terorisme di tempat-tempat publik, menambah daftar kasus intoleransi dan radikalisme di Kota Bandung. Dalam rangka mencegah terjadinya konflik yang lebih luas, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan program aksi nasional melalui pembentukan kampung toleransi dan kegiatan pembinaan kerukunan beragama, yang menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pembinaan kerukunan beragama di Kota Bandung. Tujuannya mengetahui proses, kendala dan strategi yang dilakukan dalam melaksanakan urusan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung cukup efektif dalam menangani masalah konflik sosial dan intoleransi beragama. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan serangkaian program kegiatan untuk mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan beragama dalam keragaman etnis dan budaya. Koordinasi di antara pimpinan daerah yang tergabung dalam Forkopimda baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan terjalin secara sinergis, dalam mengantisipasi dan mencegah gejala konflik sosial yang ada. Meskipun, pelaksanaan pembinaan kerukunan beragama sudah berjalan efektif, namun Pemerintah Kota Bandung perlu membangun model pembinaan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak swasta sehingga dapat lebih menciptakan kerukunan dan harmoni sosial yang lebih kuat dalam menekan potensi konflik dan fragmentasi secara sosial politik di masyarakat.

Kata Kunci: Intoleransi, Radikalisme, Urusan Pemerintahan Umum, Kerukunan Beragama.

PENDAHULUAN

Kemajuan pembangunan di Kota Bandung, baik sektor jasa, pariwisata, kuliner dan pendidikan menjadi daya tarik masyarakat, untuk singgah demi mencari nafkah, mengenyam pendidikan, maupun menjadikannya sebagai tempat tinggal. Kemajuan pembangunan ini menjadikan karakter Kota Bandung hampir sama dengan kota metropolitan lainnya, dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi serta komposisi penduduk yang beragam etnis, budaya, dan agama. Sehingga, Kota Bandung menjelma menjadi kota yang bermasyarakat heterogen dengan kompleksitas permasalahan sosial.

Salah satu permasalahan sosial yang kini dihadapi Kota Bandung adalah intoleransi dan radikalisme. Beberapa kasus terjadi yang diklaim sekelompok masyarakat atas nama agama mayoritas telah membatasi ruang gerak dan kebebasan beribadah agama lain. Bandung yang semula sebagai kota bersahabat menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang termasuk kategori kota intoleran versi Setara Institute dan Komnas HAM.

Penelitian Setara Institute tahun 2015, menunjukkan bahwa 6 dari 10 kota paling intoleran di Indonesia berada di Jawa Barat, dan salah satunya adalah Kota Bandung dengan indeks 4,16. Desk KBB Komnas HAM dalam laporan akhir tahun tentang kebebasan beragama 2015 dan 2016 mencatat jumlah pengaduan tertinggi terkait pelanggaran hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama (KBB) berasal dari Jawa Barat (Komnas HAM, 2017 : 1).

Menurut penelitian Komnas HAM tahun 2017, intoleransi di Jawa Barat terjadi karena adanya regulasi-regulasi daerah bernuansa

agama tertentu dan lebih menonjolkan agama mayoritas. Berbagai peraturan tersebut diduga kuat secara substansial dapat melanggar hak atas KBB dan berpotensi melahirkan diskriminasi atas nama agama; kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama dalam satu komunitas masyarakat (Komnas HAM, 2017: 1-5). Berdasarkan penelitian Komnas HAM pula, disebutkan bahwa sebagian besar aksi kekerasan dan persekusi terhadap kelompok agama merupakan pengulangan dari aksi-aksi serupa sebelumnya, tak pernah terjadi secara spontan. Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas aparat pemerintah dalam mengelola keragaman baik merumuskan strategi pencegahan dan respons terhadap resiko konflik keagamaan (2017: 1)

Sidney Tarrow (1983:26-34) mengidentifikasi tiga situasi yang bisa mendorong terjadinya suatu konflik sosial, yaitu: struktur kesempatan politik (akses terhadap institusi politik), adanya kelompok pendukung (aliansi) dan stabilitas peta politik (*political alignment*). Berdasarkan pendapat Tarrow di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa regulasi yang cenderung berpihak pada kelompok agama mayoritas, tidak berdayanya aparat terhadap tekanan yang disampaikan kelompok-kelompok tersebut menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang sehingga menciptakan struktur kesempatan politik yang mendukung, sehingga memudahkan mobilisasi kelompok untuk melakukan kekerasan kepada kelompok agama lain.

Masalah intoleransi dan radikalisme berbasis agama umumnya terjadi pada

situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Protes melalui aksi terorisme diyakini sebagai salah satu strategi politik dari kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintah yang kuat dan berkuasa (Djelantik, dkk, 2013:9). Selanjutnya, masih menurut Djelantik, dorongan untuk melakukan kekerasan yang dilakukan kelompok intoleran dan radikal juga diperkuat dengan kecenderungan kelompok untuk melakukan glorifikasi. Atas klaim derajat keimanan, mereka menganggap diri mereka lebih suci dari kelompok lain yang berbeda pemikiran maupun keyakinan. Adanya truth claim, menganggap ajaran yang mereka yakini paling benar, sambil melegitimasi tindakan-tindakan agresif mereka dengan ayat-ayat Tuhan. Kecenderungan menganggap suci, ajaran atau keyakinan diri sendiri ini kemudian melahirkan apa yang di namakan dehumanisasi dan demonisasi (2013:17). Tindakan kekerasan atas nama Tuhan yang mereka lakukan justru menggunakan cara-cara setan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kehidupan bernegara atau wilayah, manusia-manusia yang tergabung di dalamnya memang memiliki potensi konflik dan perpecahan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berkonflik, baik konflik dalam dirinya sendiri, konflik dengan orang lain, maupun berkonflik dengan lingkungannya. Meskipun dikatakan bahwa penyatuan manusia dalam suatu negara dan bangsa karena adanya kesamaan sebagai ikatan sosial maupun psikologis antara anggotanya, seperti kesamaan etnis, budaya, bahasa, maupun sejarah. Namun

konflik dalam suatu bangsa dan negara akan selalu ada.

Konflik merupakan hukum alam dan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Berbagai hal dapat menyebabkan konflik, seperti konflik kepentingan karena persaingan merebut sumber daya maupun konflik identitas dan nilai. Konflik identitas dan nilai ini karena manusia memiliki pandangan hidup baik pandangan tentang prinsip dirinya maupun pandangan tentang dunia di luarnya (Darsono, 2010: 2-3). Meskipun manusia rentan terhadap konflik, tidak berarti bahwa membangun identitas bangsa adalah sesuatu yang muskil. Justru perjuangan membangun identitas bangsa pada negara-negara yang plural menjadi bagian penting dan sejajar dengan pembangunan suatu negara (Fathurochman, 2008: 9).

Identitas merupakan konstruksi dan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Identitas selalu didasari oleh konteks sosial dan kultural yang berkembang, bukan datang dari pihak luar. Identitas yang muncul merepresentasikan negosiasi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Proses negosiasi ini idealnya bukan dalam bentuk marginalisasi salah satu pihak, bukan separasi, tidak cukup sekadar asimilasi, tetapi merupakan integrasi (Liebkin, 2003: 144; Padilla & Perez, 2003: 40).

Gutmann berpendapat bahwa politik identitas dapat memberi pengaruh terhadap keberhasilan demokrasi. Politik identitas dianggap baik bilamana mampu menyediakan nilai solidaritas, membangun kesadaran publik tentang kewargaan (*civic*), melawan ketidakadilan terhadap kelompok tanpa mempromosikan supremasi kelompok

sendiri dan menunjukkan terhadap kelompok lain (Gutmann, 2003: 35-38). Namun demikian, pembentukan identitas kebangsaan tidak serta merta identitas-identitas kelompok yang ada di dalamnya menjadi larut dan musnah. Bagaimanapun, setiap kelompok memiliki kecenderungan untuk mempertahankan identitasnya.

Ketika berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, anggota sebuah kelompok akan menunjukkan dan mempertahankan identitasnya. Pertahanan identitas ini dengan sendirinya akan membentuk batas-batas kultural (*cultural boundaries*). Pertahanan identitas akan terlihat bilamana suatu kelompok sebagai bagian unit kelompok yang lebih besar tersebut memperlihatkan perilaku yang khas dan berbeda (Barth, 1988: 16).

Menurut Fathurochman, politik identitas dianggap baik dalam konteks kebangsaan, di mana identitas muncul sebagai pertanda kebangkitan dari suatu masyarakat atau negara. Satu hal yang sangat menarik ternyata identitas suatu bangsa hampir selalu berbentuk multi identitas. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pengembangan citra bangsa untuk memperoleh identitas positif harus melalui proses yang panjang, historikal, dengan mengembangkan peradaban dan kultur yang kuat serta dibangun dari potensi yang ada. Pertama adalah berpegang pada komitmen untuk menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Nilai-nilai identitas bangsa harus ditanamkan dan secara psikologis terinternalisasi pada setiap warga. Setiap warga negara maupun penguasa selalu berusaha menjaga dan melestarikan identitas bangsa secara positif (Fathurochman, 2008: 3-5).

Di samping konflik, perbedaan yang menyebabkan keragaman manusia adalah kodrat. Oleh karena itu, penerimaan dan penilaian terhadap kebhinekaan merupakan konstruksi sosial psikologis yang tidak ada dengan sendirinya tanpa sengaja, namun harus dibangun dengan pola inklusif, yang mana penerimaan dan pengelolaan kebhinekaan menjadi sikap menerima perbedaan sebagai bagian dari nilai-nilai dasar yang dioperasionalisasikan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Dalam kajian psikologi sosial, ada beberapa model kebhinnekatunggalikaan. Model yang dimaksud adalah dekategorisasi, rekategorisasi, perbedaan mutual, dan model identitas hierarki ganda (Fathurochman (2008: 3-7). Penjelasan keempat model tersebut sebagai berikut:

Model *Dekategorisasi*, upaya menyatukan dan menyelaraskan relasi antara dua kelompok atau lebih, dengan cara melakukan eliminasi bias ingroup favoritisme melalui diferensiasi dan tumbuhnya personalisasi. Model ini merupakan upaya untuk mengenali kembali adanya diferensiasi individu di dalam kelompok dan personalisasi (adanya keunikan) pada setiap anggota kelompok. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kontak interpersonal dari anggota-anggota kelompok yang berbeda-beda secara intensif. Kontak interpersonal dilakukan dengan suasana interaksi yang setara, intimasi, dan kooperatif.

Model rekategorisasi merupakan upaya untuk menstrukturisasi ulang kategorisasi kelompok pada level yang lebih tinggi secara inklusif. Dua kelompok atau lebih yang masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda akan memiliki satu identitas

kelompok yang umum. Rekategorisasi secara positif dapat menumbuhkan kebanggaan, cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang lebih tinggi. Namun, secara negatif, rentan terhadap konflik internal, dan dapat mengakibatkan perpecahan bilamana salah satu kelompok merasa tertindas dan diperlakukan berbeda dengan anggota kelompok yang lain.

Model diferensiasi mutual, menekankan pada aspek kerjasama tanpa mengabaikan kategorisasi yang ada. Tiap kelompok dapat memelihara identitas masing-masing tanpa perlu melakukan rekategorisasi di antara mereka. Agar kelompok-kelompok yang memiliki identitas berbeda tersebut dapat kerjasama secara mutual, maka model kerjasama yang direkomendasikan adalah komplementari. Artinya, bidang-bidang kerjasama yang digarap adalah bidang yang merupakan keunggulan satu kelompok dan diperlukan oleh kelompok lain. Kelompok-kelompok yang terlibat juga harus memiliki tujuan bersama. Agar perbedaan antarkelompok dapat diminimalisasi, maka secara struktural harus ada kesetaraan ekonomi dan politik.

Model identitas hierarki ganda, menggunakan pendekatan multiidentitas, mengarahkan individu-individu dan kelompok-kelompok untuk memiliki lebih dari satu identitas. Secara operasional, identitas ganda yang dimaksud bisa horisontal ataupun vertikal. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang perlu dipertegas adalah identitas ganda yang vertikal atau hirarkhis. Sedangkan, identitas kesukuan atau kedaerahan ditempatkan pada level yang lebih rendah dibanding identitas nasional. Identitas nasional bersifat

inklusif yang selalu menjaga agar tidak terjadi gesekan antarkelompok dengan cara menjaga kesetaraan status dalam berinteraksi. Kelompok identitas nasional harus memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelompok identitas lainnya yang lebih kecil atau di level daerah. Model ini akan membangun nasionalisme, di mana kelompok-kelompok memiliki identitas yang sama dan merepresentasikan diri sebagai suatu bangsa dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

Pengembangan model kebhinekaan sebagaimana yang ditawarkan Fathurochman signifikan dalam membangun pluralisme kewargaan. Masalah konflik sosial berbasis agama tidak hanya dipandang dari masalah perbedaan identitas kelompok saja, melainkan juga sudah menjadi masalah kebangsaan dan disharmonisasi sosial. Solusi masalah konflik keagamaan tersebut bukan hanya pada pendekatan penegakan hukum tetapi juga diperlukan suatu rekayasa sosial yang dapat mendukung terlaksananya rekonsiliasi kebangsaan untuk mencapai kerukunan dan integrasi bangsa.

Sudah menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan integrasi bangsa dengan mengatasi konflik di antara warganya. Pemerintah memiliki tugas membina kerukunan dan menjaga harmonisasi sosial. Tugas tersebut termasuk dalam urusan pemerintahan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, dapat dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Bupati/wali kota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal, dan pelaksanaannya dibiayai dari APBN. Adapun yang dimaksud urusan pemerintahan umum, meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar-suku dan intra-suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Selanjutnya, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum berjalan lancar, pemerintah daerah membentuk Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan. Forkopimda masing-masing diketuai oleh pimpinan wilayah. Ditingkat provinsi dipimpin gubernur, kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota, dan di kecamatan dipimpin oleh camat. Anggota Forkopimda terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah. Sedangkan anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum terkait pembinaan kerukunan beragama tersebut, pemerintah membentuk program aksi secara nasional, di antaranya adalah membentuk Kampung Toleransi yang dilaksanakan di daerah, tidak terkecuali di Kota Bandung. Program ini sebuah upaya menciptakan iklim sosial politik yang kondusif dan masyarakat mampu menyikapi perbedaan secara baik, sehingga beragam etnis budaya dan agama dapat hidup berdampingan secara rukun,

aman dan damai dalam satu kesatuan masyarakat.

Sehubungan aksi nasional tersebut, pemerintah Kota Bandung berencana membentuk Kampung Toleransi di setiap kecamatan sebagai miniatur bangsa dalam menyikapi perbedaan suku dan agama yang ada di Indonesia. Hingga tahun 2017, Kota Bandung telah memiliki 14 kampung toleransi dari 30 kecamatan yang ada. Hal ini menunjukkan, target pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya tercapai. Pertanyaan penelitian ini mengenai (1) faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung dalam membentuk kampung toleransi?; (2) strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga kerukunan beragama dan harmonisasi sosial?; dan (3) model apa yang perlu diterapkan dalam rangka mengembangkan kerukunan hidup beragama dan harmonisasi sosial?

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala, strategi yang dilakukan, serta model pengembangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam rangka membina kerukunan hidup beragama dan harmonisasi sosial di Kota Bandung. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai model pengembangan dan peningkatan strategi yang perlu dilaksanakan pemerintah dalam pembinaan kerukunan beragama.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berlokasi di Kota Bandung, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan sebagai bahan analisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data

primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip data Pemerintah Kota Bandung dan media massa. Tahapan analisis melalui kategorisasi, seleksi, reduksi, interpretasi logis dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi, yakni membandingkan data yang bertujuan untuk mencari titik temu antara jawaban informan, data sekunder dengan teori-teori sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Bandung sebagai kota intoleran di Indonesia karena sering terjadi pelanggaran HAM dan konflik sosial berbasis agama. Konflik sosial ini dikhawatirkan berpotensi mengganggu kerukunan hidup beragama dan harmonisasi kehidupan sosial di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa kasus intoleransi dan radikalisme yang pernah terjadi di Kota Bandung, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Beberapa Kasus Intoleransi dan Radikalisme di Kota Bandung

No	Waktu Kejadian	Peristiwa	Pelaku
1	Oktober 2012	Perusakan Mesjid Ahmadiyah	Oknum Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya
2	Juni 2016	Dugaan pemerasan oleh ormas terhadap pembangunan gereja dengan dalih bangunan tempat ibadah tersebut tidak memiliki izin	Oknum ormas
3	Desember 2016	Pembubaran acara Kebaktian Natal umat Kristen dengan alasan kegiatan ibadah tidak boleh dilakukan di tempat umum	Pembela Ahlus Sunnah (PAS)

Isi Tabel 1 No. 4 Bersambung ke Halaman 54

4	Februari 2017	Bom Panci di Taman Pendawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo Bandung	SA alias Gunung alias Zalzalal alias AF
5	Agustus 2017	Aksi terorisme di Buah Batu Bandung	Teroris berinisial AW

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Media Massa, Penelitian 2017

Petikan kejadian di atas merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus intoleransi dan radikalisme yang marak di Kota Bandung. Berbagai kasus tersebut dengan sekejap mengubah citra Kota Bandung, semula dikenal sebagai kota yang bersahabat, kini berubah menjadi salah satu kota yang dinilai rawan intoleransi dan radikalisme, sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial-politik yang lebih besar. Terdapat fakta, banyak teroris yang ditemukan bermukim atau meracik bom di Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung, yang juga banyak ditemukan terduga teroris.

Tabel 2. Beberapa Nama Terduga Teroris yang Bermukim di Kota Bandung

Nama	Aktivitas	Tempat Tinggal	Tanggal Penang-kapan
FRT alias Baid	Dosen di Perguruan Tinggi Bandung	Kampung Sukaluyu, RT. 02, RW 12, Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Bandung	Agustus 2010
WM alias Dadan alias Tio alias Alan alias AS (anak salah satu dari anggota MUI)	Pemimpin jaringan teroris di Bandung, bertugas menggalang dana untuk dikirimkan ke daerah konflik di wilayah Indonesia Timur. Pernah aktif sebagai pasukan jihad di Filipina		

Isi Tabel 2 Bersambung ke Kolom Berikut

	Selatan dan Konflik Poso		7 Mei 2013
AS alias AM alias AA	Ahli mekanik listrik di apartemen, memiliki hubungan dengan kelompok radikal dan tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah	Kos di Jalan Kebong Gedang III, RT. 2/11, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung	8 Maret 2017
SA alias Gunung alias Zalzalal alias AF	Diduga sebagai pemodal teroris Yayat Cahdiyat alias Abu Salam, merupakan pelaku bom panci di Taman Pandawa dan aksi baku tembak di Kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	Tertangkap di Jalan Jamika, Gang Bahpian, RT 9, RW 6 kelurahan Sukahaji, Bandun	9 Maret 2017
WS	Terduga jaringan aksi teror di Kampung Melayu Jakarta	Tinggal di Ciwastra Bandung dan tertangkap di Buah Batu Bandung	24 Mei 2017
A	Pengusaha karpet, terduga jaringan aksi teror di Kampung Melayu Jakarta	Tinggal di Rumah Kontrakan, Kampung Parunghalang 10/01, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah	22 Mei 2017

Sumber: Dilolah dari berbagai sumber Media Massa, Penelitian 2017

Berbagai kasus intoleransi dan radikalisme yang terjadi di Kota Bandung, membuat Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih responsif terhadap berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Komitmen Pemerintah Kota Bandung adalah mengembalikan citra positif Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah dengan berpartisipasi melaksanakan program aksi nasional dengan membentuk kampung toleransi.

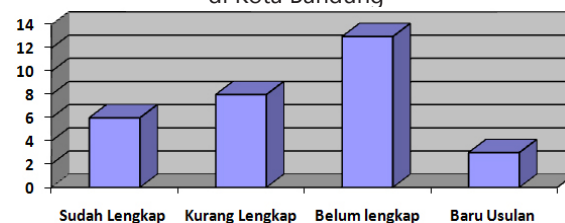
Kota Bandung berkepentingan untuk ikut serta melaksanakan kampung toleransi karena tingkat kemajemukan (etnis maupun agama) di kota ini cukup tinggi. Tujuan Pemerintah Kota Bandung membentuk kampung toleransi agar dapat menjaga iklim sosial politik daerah yang kondusif bagi kehidupan masyarakat melalui menumbuhkembangkan rasa kekeluargaan dan menghargai perbedaan, serta menghilangkan sikap intoleran di masyarakat. Diharapkan melalui pembentukan kampung toleransi ini, kondisi sosial politik yang kondusif dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah.¹

Responsivitas Pemerintah Kota Bandung membangun kampung toleransi dalam rangka menciptakan kehidupan damai dalam keberagaman, terutama menjaga keamanan dan kerukunan beragama dari bahaya konflik sosial, merupakan wujud pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menargetkan di setiap kecamatan dibangun proyek miniatur kehidupan yang damai dalam keragaman dalam wadah NKRI. Namun demikian, saat ini baru terbentuk 14 kampung toleransi, yang terdiri dari enam Kampung toleransi yang sudah memiliki dokumen lengkap baru enam kecamatan, sedangkan di delapan kecamatan lainnya, status dokumennya kurang lengkap karena salah satu syarat administratif yang dibutuhkan belum tersedia.

¹Wawancara dengan Bapak Dadang Setiawan, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kota Bandung.

Perkembangan pembentukan kampung Toleransi di Kota Bandung dapat disarikan dalam Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Status Pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung



Sumber: Bakesbangpol Kota Bandung, 2018 (data diolah)

Belum semua kecamatan di Kota Bandung telah terbentuk Kampung Toleransi, dikarenakan beberapa kecamatan belum melengkapi dokumen, baik profil kecamatan dan SK Camat. Sedangkan tiga kecamatan lainnya baru sebatas usulan warga. Keterangan tentang status pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung Tahun 2017

No	Kecamatan	Kampung Toleransi		Keterangan
		Profil Kampung	SK Camat	
1	Andir	Belum	Belum	Belum lengkap
2	Antapani	Belum	Sudah	Profil Kampung belum lengkap
3	Arcamanik	Belum	Sudah	Profil Kampung belum lengkap
4	Astana Anyar	Belum	Sudah	Profil Kampung belum lengkap
5	Babakan Ciparay	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
6	Bandung Kidul	Belum	Belum	Belum lengkap
7	Bandung Kulon	Belum	Belum	Baru usulan warga
Isi Tabel 3 No. 8 Bersambung ke Halaman 56				

8	Bandung Wetan	Belum	Belum	Belum lengkap
9	Batununggal	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
10	Bojongloa Kaler	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
11	Bojongloa Kidul	Belum	Belum	Belum lengkap
12	Buah Batu	Belum	Belum	Belum lengkap
13	Cibeunying Kaler	Belum	Belum	Belum lengkap
14	Cibeunying Kidul	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
15	Cibiru	Sudah	Belum	SK Camat Belum
16	Cicendo	Belum	Sudah	Profil Kampung belum lengkap
17	Cidadap	Belum	Belum	Baru usulan warga
18	Cinambo	Belum	Belum	Belum lengkap
19	Coblong	Belum	Belum	Belum lengkap
20	Gede Bage	Belum	Belum	Belum lengkap
21	Kiara Condong	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
22	Lengkong	Sudah	Belum	SK Camat Belum
23	Mandalajati	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap
24	Panyileukan	Belum	Belum	Baru usulan warga
25	Rancasari	Belum	Belum	Belum lengkap
26	Regol	Belum	Sudah	Profil Kampung Belum lengkap
27	Sukajadi	Belum	Sudah	Profil Kampung Belum lengkap
28	Sukasari	Belum	Belum	Belum lengkap
29	Sumur Bandung	Belum	Belum	Belum lengkap
30	Ujung Berung	Belum	Belum	Belum lengkap

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2017

Kecamatan yang telah membentuk Kampung Toleransi dan sudah memiliki dokumen yang lengkap, dapat diresmikan oleh camat. Namun, dua di antaranya telah diresmikan oleh Walikota, yaitu di Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong dan Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler. Dua wilayah tersebut menjadi wilayah percontohan Kampung Toleransi di Kota Bandung. Karena, selain sebagai wilayah padat pemukiman, juga wilayah yang memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, di mana penduduk asli dan masyarakat pendatang dari berbagai etnis dan agama hidup rukun di dalamnya.

Menurut keterangan salah satu warga Gang Ruhana, Kelurahan Paledang, kecamatan Lengkong, jauh sebelum diresmikan sebagai Kampung Toleransi, masyarakat sudah hidup rukun berdampingan meskipun berbeda etnis dan agama antara masyarakat Muslim, Tionghoa Kristen, dan Buddha Konghucu. Di wilayah tersebut, rumah ibadat berdiri berdampingan yakni mesjid Al-Amanah, Gereja Pantekosta, dan Vihara Girimetta (berdiri tahun 1946). Terdapat 75 persen masyarakat Kristiani dan masyarakat Buddha, sisanya 25 persen adalah masyarakat Muslim.

Meskipun jumlah penduduk Muslim lebih sedikit, namun ketika masyarakat hendak mendirikan mesjid, tidak ada penolakan dari masyarakat yang beragama lain. Sikap toleransi yang tinggi juga ditunjukkan dari sikap saling menghargai kegiatan ibadah agama lain. Misalnya ketika Imlek jatuh di hari Jum'at pada tahun 2016, aktivitas masyarakat Buddha bersembahyang di Vihara dihentikan sesaat untuk menghormati Muslim yang hendak menjalankan Salat Jum'at. Sebaliknya, umat

Muslim di wilayah tersebut juga tidak keberatan apabila jalan menuju Vihara yang melewati depan mesjid dihiasi lampion sebagai wujud kemeriahan masyarakat Buddha merayakan Imlek. Kemudian, pada saat Idul Adha, masyarakat non Muslim juga turut menyumbangkan hewan kurban.

Berbeda halnya di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler, di kawasan ini sekitar 80 persen penduduknya adalah Muslim, sisanya beragama Kristen, Katolik, dan Buddha. Meskipun demikian, di wilayah ini, rumah ibadah dari agama yang berbeda terhitung cukup banyak. Di kawasan ini terdapat dua buah mesjid, enam gereja, dan empat wihara. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dan sudah biasa melaksanakan kegiatan yang bersifat lintas agama. Seperti kegiatan kerja bakti melakukan kebersihan menjelang hari-hari besar agama.

Di wilayah ini juga dibentuk Forum Toleransi beragama, di mana setiap masyarakat apapun agamanya dapat berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain. Wujud toleransi yang ditunjukkan masyarakat kelurahan Jamika, merupakan toleransi yang sesungguhnya diajarkan dalam agama Islam.

Menurut Fadzil (2011: 348), nilai toleransi tidak dipahami oleh kelompok-kelompok radikal yang kerap mempromosikan Islam sebagai agama yang mendoktrinkan kekerasan dan terorisme. Sama halnya dengan demokrasi, Islam pun menganggap kebebasan dan kesetaraan manusia adalah fundamental, dan menganggap manusia memiliki status yang setara. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua manusia, meskipun terbagi menjadi bangsa dan ras,

memiliki karakteristik tertentu dan memiliki martabat yang sama. Pemahaman ini yang membantu Muslim untuk toleran terhadap non-Muslim, yang mana mereka diajarkan untuk menyadari bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan yang menganugerahkan pada kebebasan manusia untuk memilih keyakinannya sendiri (Fadzil, 2011: 350).

Kebebasan beragama dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain adalah ajaran agama Islam, yang penting bagi kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, menghargai kebebasan beragama dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dianggap sebagai bagian dari sikap Muslim (Wirman, 2017: 27).

Kerukunan hidup beragama di Kelurahan Paledang dan Kelurahan Jamika menunjukkan bahwa pluralitas agama merupakan fakta yang diperlukan untuk pengembangan spiritual dan material masyarakat. Benturan dan diferensiasi pemikiran, dapat membangkitkan pemikiran yang baru dan membuat masyarakat menjadi lebih dinamis. Lebih penting daripada ini, jika tidak ada agama yang berbeda, pandangan dunia yang berbeda, tidak ada agama yang akan bertahan hidup. Oleh karena itu, keragaman agama tidak perlu ditakutkan. Justru sebaliknya, keragaman adalah sumber kelangsungan hidup dan manusia harus mendorong kerukunan hidup dalam keragaman tersebut (Yitik, 2001: 2).

Kerukunan hidup beragama dan toleransi di Kelurahan Paledang dan Kelurahan Jamika, diharapkan dapat diikuti oleh warga di kelurahan dan kecamatan lainnya. Namun demikian di beberapa wilayah, belum semua masyarakat siap

membentuk Kampung Toleransi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung karena konsolidasi dan mobilisasi masyarakat berjalan lamban, sehingga cukup sulit menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan beragama dan keharmonisan sosial di wilayah tempat tinggalnya.

Konflik elit politik baik di tingkat nasional maupun lokal setidaknya turut mempengaruhi lambannya konsolidasi dan mobilisasi tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa elit politik seringkali menjadikan isu etnis dan agama sebagai komoditas politik untuk memperoleh dukungan massa dalam persaingan politik menjatuhkan pemerintahan yang sah. Para elit politik tersebut dengan sekuat tenaga memprovokasi masyarakat, sehingga konflik di tubuh elit politik berpotensi meluas kepada konflik sosial di tingkat massa. Bagaimanapun upaya pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan perdamaian dalam keragaman tidak cukup optimal jika tidak didukung oleh elit politik. Padahal menurut Reilly, rekonsiliasi kebangsaan akan terwujud bilamana terbentuk aliansi kekuatan di antara aktor-aktor politik yang berasal dari kelompok identitas yang beragam (Reilly, 2012:2).

Selain membentuk Kampung Toleransi, pelaksanaan urusan pemerintahan umum mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan beragama, dilakukan dengan membentuk komisi intelijen daerah yang terdiri dari unsur kecamatan, masyarakat, TNI dan polisi. Tugas dari komisi intelijen daerah ini adalah untuk memantau kondisi sosial, melakukan pengawasan, dan penanganan konflik. Pemerintah Kota Bandung melibatkan masyarakat

sebagai kunci utama dengan membentuk berbagai forum di antaranya Forum Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Kewaspadaan Dini. Forum-forum tersebut dibentuk untuk menangani masalah-masalah sosial yang muncul dan mendiskusikan strategi yang perlu dilakukan dalam menangani masalah tersebut.

Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi secara formal maupun komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan pada saat rapat resmi untuk membahas kasus-kasus atau gejala yang muncul. Sedangkan komunikasi intensif banyak dilakukan pada jalur informal, yaitu melalui media sosial (diskusi melalui aplikasi Whatsapp/WA) untuk membahas temuan-temuan, langkah dan strategi yang dilakukan dalam penanganan dan peningkatan kewaspadaan sosial.

Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung tersebut, saat ini dinilai sudah cukup optimal dalam menjaga kerukunan beragama dan harmonisasi sosial. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung lebih ditekankan pada upaya persuasif, edukatif dan preventif. Upaya ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan kewaspadaan dini daripada penanganan konflik. Dengan demikian, meskipun Kota Bandung rawan konflik sosial dan paling dekat dengan ibukota, namun masalah konflik sosial dan agama berhasil diredam. Sehingga konflik-konflik yang terjadi masih dalam skala kecil dan dampaknya tidak berhasil menciptakan kerugian yang besar maupun mengorbankan nyawa masyarakat.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum menjaga kerukunan beragama dan harmonisasi sosial, Pemerintah Kota

Bandung mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan masyarakat. Anggaran dari pemerintah pusat saat ini dinilai sudah cukup, namun upaya ini dapat lebih ditingkatkan dan memperoleh hasil yang lebih optimal jika didukung oleh kebijakan di tingkat daerah. Tidak semua regulasi daerah di Kota Bandung dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan. Misalnya dukungan anggaran, yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi, pengkondisian daerah dan konsolidasi di masyarakat hingga tingkat kecamatan. Kebutuhan anggaran ini sesungguhnya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Sayangnya, Dana PIPPK lebih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Sedangkan anggaran fasilitas sosial sama sekali tidak ditujukan secara langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat menjaga kerukunan beragama dan keharmonisan sosial. Padahal sebagian dari dana PIPPK tersebut dapat disisihkan bagi pendanaan pemberdayaan masyarakat dalam membentuk kampung-kampung toleransi di tiap-tiap kecamatan, sehingga proyek Pemerintah Kota Bandung dalam membangun miniatur kehidupan keberagaman yang damai di setiap kecamatan dapat terwujud.

Selain itu, pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam upaya pembinaan kerukunan beragama oleh Pemerintah Kota Bandung baru melibatkan masyarakat, namun belum melibatkan peran swasta. Padahal dengan melibatkan peran swasta untuk bersama-sama menjaga kerukunan beragama dan harmonisasi sosial akan memberikan keuntungan bagi

pihak swasta berupa terciptanya iklim sosial politik yang kondusif yang dapat memberikan keuntungan bagi kegiatan usaha mereka. Sebenarnya, Pemerintah Kota Bandung bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha dapat membuat program-program sosial dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan keragaman sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di antaranya, pengenalan keragaman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya di masyarakat dapat menjadi salah satu objek pariwisata.

Pemerintah juga dapat melaksanakan parade kerukunan beragama, bazar kerajinan dan makanan khas etnis dan agama, melakukan kontes menciptakan disain batik kerukunan beragama, menyediakan taman bermain dan belajar kerukunan beragama untuk anak usia dini, teater ataupun wayang yang menggambarkan kerukunan hidup beragama di masa lampau dan masa kini. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog lintas agama di Kampung Toleransi secara periodik dan berkelanjutan yang diliput media. Dialog tersebut, menurut Khotimah (2015: 96) bukan hanya sekadar pertukaran informasi, seremonial, dan basa-basi, tetapi harus memiliki norma agama yang dapat mendamaikan perbedaan antaragama.

Dalam membangun kerukunan beragama dan harmonisasi sosial, Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan model kebhinekaan sebagaimana yang ditawarkan oleh Fathurochman (2008:3-7). Dalam hal ini, ada dua model yang cocok untuk diterapkan dalam mewujudkan kebhinekaan bermasyarakat, yakni model dekategorisasi dan model identitas hierarkhi ganda.

Tabel 4. Model Keberagaman

Model Keberagaman	Sifat Pendekatan	Upaya yang Dilakukan
Model Dekategorisasi	Edukasi	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerima perbedaan dan keragaman. Menciptakan hubungan interpersonal dan inklusif yang menerima secara terbuka keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Saling menghargai nilai-nilai kepercayaan, tradisi, agama masing-masing.
Model Identitas Hierarkhi Ganda	Preventif dan Persuasif	Menciptakan multi identitas kepada masyarakat dan juga melibatkan swasta, yakni sebagai warga Kota Bandung, dengan etnis dan agama yang berbeda, membangun identitas bersama yaitu identitas nasional, bahwa warga Bandung merupakan bagian dari bangsa Indonesia berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, memiliki hak dan tanggung jawab bersama menjaga kerukunan dan persatuan bangsa

Model dekategorisasi digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat di Kota Bandung. Dekategorisasi dilakukan secara kognitif dengan memberikan pengetahuan/ pendidikan untuk memperkuat pemahaman bahwa perbedaan-perbedaan (diferensiasi) individu akan selalu ada dalam masyarakat. Namun demikian, upaya yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran-peran kepada tiap-tiap individu untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota masyarakat yang berkewajiban menjaga perdamaian dan persatuan bangsa.

Komunikasi dan kontak interpersonal ditingkatkan di antara anggota-anggota kelompok masyarakat sebagai kunci utama terciptanya kerukunan dan persatuan melalui forum-forum dan komunikasi, baik secara formal maupun informal secara kooperatif

dan hangat. Masyarakat dilibatkan untuk bekerjasama secara individu dan kelompok untuk menjaga kerukunan dalam suatu relasi yang setara secara sosial. Model identitas hierarkhi ganda juga diterapkan, yang mana Pemerintah Kota Bandung melalui pendekatan multiidentitas kepada masyarakat terutama para pemuda, untuk memahami bahwa selain dirinya sebagai warga Bandung juga sebagai anak bangsa Indonesia, sehingga rasa cinta kebangsaan dan nasionalisme tertanam dalam diri mereka. Melalui penciptaan masyarakat dengan multiidentitas inilah, maka identitas nasional ditempatkan pada level yang lebih tinggi daripada identitas kesukuan atau kedaerahan. Komunikasi intensif, baik secara formal maupun informal terus dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi di antara masyarakat Kota Bandung, untuk menghindari gesekan antarkelompok dan terbangunnya saling pengertian dan penerimaan perbedaan atau keberagaman.

Sejauh ini kedua model keberagaman tersebut cukup efektif dalam menangani masalah keragaman dan kerukunan bangsa. Yakni melalui model dekategorisasi, pemerintah sebagai lembaga superior menyadari fitrah manusia untuk hidup berkelompok, dan keberadaan kelompok-kelompok tersebut diterima dan diakui, kemudian memfasilitasi interaksi-interaksi antarkelompok tersebut agar tidak bersifat eksklusif dan memicu konflik sosial. Dengan edukasi yang intensif bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan kelompok-kelompok di antara mereka. Edukasi menjadi penting, menurut Yusuf (2013: 226), karena melalui pendidikan diharapkan dapat memperluas

pemikiran kritis masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan menjadi agen perubahan dan aktor perdamaian dan toleransi. Terlepas dari perbedaan agama di antara mereka, Pajin (2013: 62) berpendapat bahwa melalui pendidikan dan dialog, diharapkan juga dapat mendorong komunitas masyarakat untuk bekerja sama mempromosikan toleransi beragama.

Namun demikian, negara sebagai superbody tetap menanamkan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat adalah kelompok kecil yang bernaung di bawah kelompok besar dengan identitas nasional bernama bangsa Indonesia. Sesungguhnya, meski Kota Bandung rawan konflik sosial namun persatuan dan kerukunan akan senantiasa terjaga bilamana Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat berkomitmen penuh terhadap pembangunan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang diperkuat oleh 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dan mampu melaksanakan pembangunan ekonomi secara inklusif, tanpa diskriminasi, keadilan sosial, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sehingga menciptakan masyarakat yang bangga akan jati dirinya. Kelompok etnis dan agama yang berbeda bangga menjadi bagian masyarakat Kota Bandung, dan pada akhirnya merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dan meningkatkan keunggulan di mata bangsa lain.

PENUTUP

Perbedaan atau keberagaman akan selalu ada dalam diri manusia. Perbedaan dan

keberagaman ini rentan menimbulkan konflik baik dalam diri manusia, konflik dengan sesama, konflik dengan lingkungan, bahkan konflik manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perbedaan dan keberagaman harus dapat dikelola dengan baik, jangan sampai perbedaan menimbulkan gesekan ataupun konflik yang merugikan manusia itu sendiri.

Pemerintah Kota Bandung, dinilai cukup efektif dalam menangani masalah keragaman dan kerukunan bangsa, serta berhasil memfasilitasi interaksi-interaksi antarkelompok masyarakat yang berbeda. Sehingga mencegah terjadinya eksklusifitas kelompok yang dapat memicu konflik sosial.

Menyadari adanya ancaman radikalisme dan perpecahan, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan di antaranya membentuk kampung toleransi dan beberapa forum sebagai sarana komunikasi sosial. Seperti, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini, dan forum pembauran kebangsaan. Pembangunan Kampung Toleransi dan pembentukan forum dilakukan bertujuan meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa dan ancaman konflik sosial di Kota Bandung.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum menjaga kerukunan hidup beragama, perbedaan dan keberagaman yang berpotensi pada konflik tidak bisa lagi ditangani secara represif tetapi harus dengan cara-cara yang lebih moderat, dan yang bisa diterima atas dasar ukuran nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, model pengembangan integrasi masyarakat yang

beragam di Kota Bandung, dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif, edukatif dan preventif. Melalui edukasi yang intensif dapat diperoleh pemahaman bahwa masyarakat Kota Bandung sebagai bagian dari anggota masyarakat Indonesia yang beragam, serta menanamkan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat adalah kelompok kecil yang bernaung di bawah kelompok besar dengan identitas nasional bernama bangsa Indonesia. Perlu disadari, persatuan dan kerukunan akan senantiasa terjaga bilamana pemerintah dan masyarakat berkomitmen penuh terhadap identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang diperkuat oleh 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI,

dan Bhineka Tunggal Ika. kerukunan dan persatuan akan menciptakan situasi yang kondusif yang memberikan keuntungan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi agar tercapai kemajuan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dadang Setiawan, S.IP., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai informan utama yang banyak memberikan data dan informasi sehingga membantu penulis dalam melakukan analisis penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, Fredrik.1988, *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Penerjemah Nining I. Soesilo, cetakan Pertama, Jakarta: UI-Press.
- Darsono P,. 2010. *Budaya Organisasi: Kajian tentang Organisasi, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik*, Jakarta: Nusantara Consulting,
- Djelantik, Sukawarsini Ph.D, Stephani, Dania, Amy Nindya, Amelia, Maya Irwanti. 2013. *Terorisme dan Kekerasan Berlatar Belakang Agama di Jawa Barat*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Gutmann, Amy, 2003. *Identity in Democracy*, Princeton: Princeton University Press.
- Fadzil, Ammar. 2011. "Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia's Experiences as a Multi Racial Society". *Journal of Islam in Asia, Special Issue* No. 3, September 2011.
- Fathurochman. 2008. "Model-Model Psikologi Kebhinekatunggalikaan dan Penerapannya di Indonesia". *Makalah* disampaikan pada Temu Ilmiah dan Kongres X HIMPSI, 2008.
- Khotimah. 2015. "Religious Harmony And Government in Indonesia", *Jurnal Ushuluddin* Vol. 23 No. 1, Juni 2015.
- Komnas HAM RI. 2017. *Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Liebkin, K. 2003. *Acculturation*. In Brown, R. & Gaertner, S. (eds.). Oxford: Blackwell Publishing.
- Padilla, A.M. & Perez, W. 2003. "Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective", *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 25(1).

- Pajin, Dusan, 2013. *"Religious Pluralism: Religious Wars and Religious Tolerance"*, *Kultura*, (140).
- Reilly, Benjamin. 2012. *Electoral System and Conflict Management: Comparing STV and AV System*. Canberra: National Centre for Development Studies.
- Tarrow, Sidney. 1983, *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest*, *Occasional Paper 15*. Center for International Studies, Cornell University.
- Yitik, Ali Ihsan. 2001. *"Swami Vivekananda's Idea of Religious Diversity and Harmony"*. *Journal of Religious Culture/Journal für Religionskultur* No. 49.
- Yusuf, Hanna Onyi. 2013. *"Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum"*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013].
- Wirman. 2017. *"Plurality in The Context of Religious Harmony"*. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 22, Issue 11, Ver. 5 (November. 2017).

